

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perjuangan Suku Amungme, Kamoro, dan suku-suku kerabat lain di Pegunungan Nemangkawi terus berjalan selama belum terbebaskan dari penindasan dan ke-tidakadilan. Kehadiran Freeport hampir 50 tahun menciptakan konflik berkepanjangan di daerah Timika, Mimika, Papua hingga menyingkirkan dan memusnahkan mereka dari ke-hidupan di tanahnya sendiri. Kemakmuran dan kemajuan yang dijanjikan Freeport saat memangkas bukit, gunung yang hijau serta merobohkan salju abadi menjadi penantian yang berujung rusaknya nilai-nilai peradaban masyarakat Amungme dan suku-suku lainnya.

Freeport masuk lebih jauh ke wilayah-wilayah tanah adat, yang merusak peta tanah adat yang ada. Kekuatan dan kekuasaan Freeport menerabas daerah-daerah adat telah mendorong terjadinya konflik tapal batas. Kalusu Mimka dari konflik antar suku yang terjadi pada beberapa tahun terakhir bersumber pada perebutan tapal batas yang berubah karena kegiatan penambangan Freeport perjuangan saat ini menata kembali semangat persaudaraan yang retak dengan membicarakan tapal batas adat yang telah rusak. Kesadaran kita sebagai pemilik Gunung Nemangkawi, menjadi tumpuan utama dalam membangun peradaban Amungme, Kamoro, dan suku-suku kerabat lain.

Pada April 1960 Forbes Wilson datang ke Timika melakukan ekspedisi ke Grasberg. Ia ditemani tokoh suku Amungme, Moses Kilangin, yang dikenal

sebagai perintis gereja di Timika.³ Forbes Wilson dan Moses Kilangin menempuh perjalanan melalui rute sungai Mawati, menyeberangi sungai Tsinga. Dari lembah Tsinga menuju ke arah barat lembah Waa, selanjutnya mereka mengikuti rute tim ekspedisi Colijn. Mereka mendirikan kemah di kampung Utukini, dimana Colijn dan Dozy berkemah, lalu berjalan ke utara di sepanjang lembah Aghawagong.

Tujuh tahun sesudah Forbes Wilson menemukan kandungan emas di Nemangkawi, atau beberapa minggu Soeharto dilantik sebagai Presiden pada 7 April 1967, eksploitasi dimulai, Soeharto memberikan lisensi ke perusahaan tambang Amerika Serikat, Freeport Sulphur, sekarang Freeport McMoran, untuk menambang di Pegunungan Hertzberg di Kabupaten Fakfak, Irian Barat. Kini lokasi itu sebagian besar masuk area konsesi Freeport di Mimika. (Markus Haluk 2014).

Bradley R. Shimpson menyatakan hanya beberapa bulan setelah pecahnya peristiwa G30S (Gerakan 30 September) dan melemahnya posisi Soekarno pada bulan April 1966, perusahaan itu telah memberitahu Departemen Luar Negeri AS bahwa Freeport membutuhkan satu kelompok pengusaha pro UU PMA sebagai syarat perjanjian, yaitu perlindungan investasi dan iklim investasi yang layak. Freeport dan investor asing memandang Soekarno yang antikapitalis dan antikolonialis itu sebagai batu sandungan besar untuk mengeruk kekayaan alam di Irian Barat. Maka jatuhnya Soekarno merupakan momentum yang ditunggu-tunggu. Sesudah Soekarno dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto pada 12 Maret 1967, satu bulan kemudian UU PMA disahkan dan pada 7 April

1967 Freeport dan Pemerintah RI menandatangani Kontrak Karya pertama, lebih awal dua tahun dari Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Hal ini ada kaitannya dengan lobi-lobi Elsworth Bunker yang 1969.6 mengusulkan *New York Agreement* 1962 dan Rome Agreement.

Setelah ditelaah lebih dalam pasal-pasal dalam Kontrak Karya itu mereflesikan relasi kekuasaan Orde Baru dalam mencari legitimasi politik atas sengketa status politik Papua Barat dan pemerintah Indonesia. Soeharto membutuhkan dukungan AS, yang diam-diam berencana melangkahi Perjanjian New York yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 22 (1) yang menjamin hak atas pilihan bebas dan pasal 18 (D) yang mensyaratkan seluruh orang dewasa Papua harus diperbolehkan mengikuti Pepera untuk memilih Merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Soeharto berharap masuknya Freeport ke Papua Barat sebelum proses Pepera pada 1969 bisa memperkuat posisi Indonesia dalam merebut wilayah Papua Barat. Sementara bagi Freeport dan Amerika Serikat, mendukung Papua Barat masuk Indonesia lebih menguntungkan untuk memperoleh kepastian mengeksploitasi sumber daya alam.

Sebelumnya, izin pertambangan di Indonesia adalah jenis konsesi yang syarat-syarat perjanjiannya sangat menguntungkan kepentingan dalam negeri, di antaranya: a) Freeport akan menyerahkan seluruh peralatan yang dibawa ke Indonesia kepada Pemerintah RI, b) pendapatan, terutama yang berkaitan dengan valuta asing, akan diawasi pemerintah Indonesia, c) manajemen proyek akan dilaksanakan pemerintah dengan keterlibatan terbatas Freeport dalam hal arahan

teknis, dan d) saat Freeport sudah balik modal, Pemerintah akan mengambil alih proyek. Bentuk perjanjian konsesi itu tidak disukai Freeport. Sebagai gantinya, Freeport menyusun sendiri perjanjian yang menguntungkan pihaknya dan menempatkan perusahaan asing sebagai mitra sejajar pemerintah. Dan yang mengejutkan, seluruh rancangan Freeport itu diterima pemerintah Indonesia.

Pengoperasian Tambang Freeport di Papua dengan nama PT Freeport Indonesia dimulai dari tambang terbuka Ertsberg yang secara resmi dibuka Presiden Soeharto pada Maret 1973. Kawasan itu selesai ditambang pada 1980-an dan mewariskan Jubang sedalam 360 meter. Tahun 1988, PT Freeport mengeruk cadangan raksasa lainnya di Grasberg. Eksploitasi itu mengeruk sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 ton emas. Pada Juni 2005, lubang tambang Grasberg mencapai diameter 2,4 km di kawasan seluas 449 hektare, kedalaman 800 meter.

Ke depan Freeport Indonesia berencana akan menutup tambang emas terbuka Grasberg dan menggantinya operasi tambang bawah tanah pada 2016. Tambang bawah tanah Grasberg ini akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia dengan produksi 200.000 ton material per hari. Hingga akhir 2010 lalu, Freeport Indonesia memproduksi 235.000 ton bijih emas per hari dengan proyeksi emas 1,7 juta ons. Rencana itu diumumkan sesudah runtuhnya terowongan Big Gossan pada 14 Mei 2013, yang memakan korban 28 karyawan dan 10 orang luka-luka. Menurut CEO Freeport McMoRan Copper Gold Inc, Richard C Adkerson bahwa Freeport telah mempunyai rekam jejak yang bagus tentang operasi tambang bawah tanah, terutama soal keselamatan kerja.

Diperkirakan ada 18 juta ton cadangan tembaga dan 1.430 ton cadangan emas hingga 2041 (Bradley 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah: Bagaimana CSR PTFI melalui kemitraan YPMAC berkontribusi pada pembangunan masyarakat adat Amungme dan Kamoro (2015-2024)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis bagaimana CSR PTFI melalui kemitraan YPMAC berkontribusi pada pembangunan masyarakat adat Amungme dan Kamoro.
- 2) Menganalisis kemitraan YPMAC dalam membangun masyarakat adat Amungme dan Kamoro.
- 3) Menganalisis bagaimana strategi dan pencapaian CSR PTFI melalui kemitraan YPMAC dapat meningkatkan pembangunan masyarakat adat Amungme dan Kamoro dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat potensial dari penelitian *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTFI adalah membangun masyarakat adat Amungme dan Kamoro di wilayah pegunungan kabupaten. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di wilayah adat. Fokus penelitian ini pada isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan masyarakat adat di daerah

pertambangan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi model CSR yang berorientasi pada pembangunan dan budaya lokal, khususnya di kawasan dataran tinggi Papua agar dapat menghasilkan kerangka atau model analisis baru untuk mengevaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh perusahaan multinasional di wilayah yang memiliki kerentanan sosial dan budaya. Penelitian ini mendeskripsikan kebutuhan, tantangan dan aspirasi spesifik yang dihadapi oleh masyarakat adat Amungme dan Kamoro dalam bidang pendidikan, sosial dan pembangunan ekonomi mereka, yang mungkin berbeda dari atau kelompok masyarakat lainnya dan dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat adat Amungme dan Kamoro di tiga kampung dataran tinggi (Waa, Aroanop, dan Tsinga) di Mimika, Papua Tengah (Diwita, 2025).

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Dalam setiap bab terdapat subbab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian dan terdiri atas:

1. Latar belakang program CSR PTFI terhadap perubahan sosial dan budaya serta kesetaraan di kalangan suku Amungme dan Kamoro.
2. Kajian pustaka terkait pembangunan masyarakat adat Amungme dan Kamoro wilayah pegunungan Kabupaten Mimika dan metode penelitian.
3. CSR PTFI dalam pembangunan masyarakat Amungme dan Kamoro melalui YPMAK.
4. Evaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh perusahaan multinasional di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika yang memiliki

kerentanan sosial-ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dijalankan oleh kemitraan YPMAK.

5. Kesimpulan penelitian tentang bagaimana CSR PTFI melalui kemitraan YPMAK berkontribusi pada pembangunan masyarakat Amungme dan Kamoro (2015-2024).

1.6 Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan dan mengevaluasi peran Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai penghubung antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat dalam rangka menyediakan kebutuhan publik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penyediaan kebutuhan publik ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dipenuhi oleh PTFI. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kehadiran PTFI yang bergerak untuk mengeksplorasi tambang di Kabupaten Mimika, dan kemudian ditinjau dengan penyebab yang membuat perusahaan perlu memberikan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sebagai bentuk perbaikan atas dampak perusahaan terhadap masyarakat.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan untuk memastikan bahwa suara, tantangan, dan perspektif masyarakat Amungme dan Kamoro menjadi sentral dalam analisis. Peneliti secara kritis mengevaluasi sejauh mana program tersebut berhasil membangun masyarakat adat Amungme dan Kamoro sebagai subjek dan penerima manfaat program CSR, terutama dalam akses dan kualitas pendidikan, ekonomi dan layanan kesehatan mereka.

1.6.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan kunci seperti perwakilan YPMAC bagian pemberdayaan masyarakat Amungme tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang terlibat dalam program pembangunan di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika, serta data sekunder berupa laporan mengenai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pembangunan masyarakat melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAC), termasuk data sosial ekonomi wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data akan menggunakan data, jurnal dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi rinci mengenai implementasi program dan dampaknya, observasi partisipatif di lokasi program untuk memahami konteks sosial dan aktivitas pemberdayaan secara langsung, dan menganalisis laporan program, kebijakan CSR, dan data terkait lainnya.